

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Adalah salah satu bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya UMKM maka menjadi peluang masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan mengenalkan produk yang ada di daerahnya. Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan tentunya. Dengan adanya peningkatan peran UMKM di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, distribusi pembangunan dan pendapatan masyarakat yang belum merata dan lain sebagainya Jubaedah dan Destiana (2015).

Dalam mencapai kinerja usaha mikro kecil dan menengah yang maksimal, UMKM perlu meningkatkan modal kerja melalui peningkatan produktifitas sumber daya manusia dan peningkatan penggunaan teknologi informasi. Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan menengah dapat dilihat dengan kemampuan UMKM dalam menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik dan ditentukan oleh kemampuan para pemain industri kecil untuk mengembangkan produk-produk bisnis sehingga dapat tetap eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil dan menengah di

Indonesia adalah karena kurangnya keterampilan sumber daya manusia Sukesti (2015).

Pemerintah melalui Bank Indonesia telah membuat kebijakan yang mengharuskan bank-bank umum untuk menyalurkan pembiayaannya kepada sektor UMKM, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Aturan dan prosedur-prosedur yang dibuat oleh pihak bank ada kalanya menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, terlebih lagi jika pihak bank mengharuskan adanya aset sebagai jaminannya. Pada akhirnya pelaku UMKM hanya mengandalkan modal sendiri untuk membangun dan mengembangkan usahanya Jubaedah dan Destiana (2015).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut Jubaedah dan Destiana (2015).

Keberadaan UMKM hingga kini menopang perekonomian Indonesia dan berkontribusi besar dalam hal penerimaan devisa negara, karena produk-produk UMKM mampu bersaing bukan saja di tingkat regional tetapi juga internasional. Peranan UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan di

Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), semuanya itu bisa dioptimalkan jika sektor ini terus mendapat perhatian dan dukungan dari para pemangku kebijakan di negeri ini Jubaedah dan Destiana (2015).

Peran Usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan pada perekonomian nasional dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah lembaga keuangan, dan masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan Jubaedah et al., (2015). Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan peran usaha mikro kecil dan menengah dapat membantu dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial, seperti pengangguran dan kemiskinan, distribusi pembangunan dan pendapatan masyarakat yang belum merata, tingkat pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Industri kecil dan menengah mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM Aribawa (2016).

Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Abidoun, 2015). Dalam menjalankan suatu usaha, UMKM harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam

pengelolaan keuangan secara efektif, karena itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengakses lembaga keuangan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaan (Aribawa, 2016).

Menurut Sanistasya (2019) Kinerja merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran sejauh mana hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam akuntabilitas publik baik berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi sehingga inklusi keuangan perlu di pahami dalam suatu UMKM.

Fenomena yang terjadi pada UMKM di Kota Ternate UMKM mempunyai peran yang strategis, tetapi dalam meningkatkan kinerja UMKM merupakan yang tidak mudah. Kesulitan pengukuran kinerja merupakan suatu permasalahan bagi pelaku usaha dalam mengevaluasi kinerja usahanya karena pelaku UMKM lebih berfokus pada kegiatan operasionalnya saja sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan seringkali terabaikan dan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan serta tidak ada peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM dan pelaku UKM masih merangkap tugas dalam menjalankan usahanya dibidang pemasaran, kegiatan operasi mengatur SDM dan keuangan serta transaksi juga masih sederhana dan juga Masyarakat kota ternate termasuk Masyarakat di kelurahan masih berada pada kondisi less literate, artinya masih banyak Masyarakat belum mengerti dan teredukasi mengenai keuangan. Akibatnya, di kota ternate malah terjadi investasi yang merugikan Masyarakat, bahkan Masyarakat dengan Pendidikan tinggi sekalipun. Sebagai otoritas industri dan otoritas jasa keuangan (OJK) tentunya berkepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi

keuangan serta perlindungan ke masyarakat produk keuangan. Fokus yang ingin dilakukan dalam rangka literasi keuangan, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen yang diinginkan OJK untuk terus meningkatkan masyarakat lewat segala edukasi dan program literasi keuangan. Pertama yakni tumbuhnya kemampuan Masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan serta proteksi konsumen dapat berlangsung dengan baik di industri keuangan, salah satu cara dengan melakukan sinergi yang baik antara stakeholder untuk mendorong literasi meningkatkan literasi keuangan, dalam pembangunan ekonomi usaha mikro maupun kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah masyarakat berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha mikro kecil, baik itu sektor tradisional maupun moderen Syaifuddin (2016)

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses keuangan terhadap layanan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi Keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan, lembaga keuangan oleh masyarakat Yanti (2019). Selain itu, Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (SNKI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya.

Penelitian Yanti (2019) menunjukan bahwa apabila inklusi keuangan ditingkatkan, maka inklusi keuangan akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan suatu bisnis. Inklusi keuangan memiliki

tujuan yaitu mendorong pertumbuhan inklusif melalui penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi keuangan, serta peningkatan stabilitas sistem keuangan. Tolak ukur inklusi keuangan diketahui dari kepemilikan rekening tabungan, asuransi, jasa, pembayaran, dan kredit dari lembaga keuangan non-formal. Dalam menjalankan suatu usaha, seseorang harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola keuangan secara efektif, karena itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha.

Literasi keuangan merupakan tingkat pemahaman individu ataupun masyarakat mengenai bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, perekonomian yang dihadapi. Pengukuran literasi keuangan biasanya menggunakan indeks literasi keuangan sebagai ukuran dalam menentukan tingkatan pengetahuan, kecakapan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, baik itu produk maupun jasanya Keuangan (2017).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dengan definisi tersebut diharapkan pelaku usaha jasa keuangan, konsumen produk maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami jasa keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan dan mengubah sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penelitian oleh Apristi (2017) menyatakan bahwa kinerja UMKM akan meningkat seiring dengan peningkatan literasi keuangan yang dimiliki pelakunya. Tingkat literasi yang tinggi/baik membuat para pelaku bisnis lebih berhati-hati dalam operasionalnya dan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan sehingga kinerja usaha dapat dioptimalkan. Aribawa (2016) juga mengatakan bahwa keputusan yang diambil para pelaku UMKM terkait keuangan harus disertai dengan literasi keuangan yang baik. Suatu usaha akan berkembang ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu dengan pengambilan keputusan yang tepat.

Widiyanti (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan financial knowledge teori dimana pengetahuan keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis dan mengelola keuangan yang tersedia bagi dirinya untuk menghasilkan keputusan keuangan dengan tepat, dan dapat membantu perkembangan kinerja UMKM. Sehingga, literasi keuangan dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi perkembangan kinerja suatu usaha, khususnya UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Aribawa (2016) menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanitasya (2019) menunjukkan bahwa Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. Wuryani (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) menunjukkan bahwa Inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM. Anggreani (2015)

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan di UMKM Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wira Iko Putri Yanti (2019) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Adanya perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian ini di lakukan di Kota Ternate sedangkan penelitian sebelumnya di Sidoarjo. Perbedaan selanjutnya terdapat pada metode pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan random sampling sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode probability sampling dan sampling jenuh. Berdasarkan uraian dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu maka peneliti mengangkat Judul Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kota Ternate.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Untuk Menganalisis pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan paling utama yang berhubungan dengan Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kota Ternate.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya tentang pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Selain itu juga saran bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan diharapkan bagi pengusaha UMKM semakin sadar akan pentingnya inklusi keuangan dan literasi keuangan dalam suatu usaha.